

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep perkembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses interaktif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan rancangan yang matang dan diterapkan dengan baik. Masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang masih mengalami perkembangan wilayah yang tidak seimbang dan mengakibatkan daerah-daerah tersebut tertinggal baik dari sarana dan prasarana yang kurang memadai, aksesibilitas yang tidak baik, kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam hal ini, perkembangan suatu wilayah jelas dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jumlah penduduk, konektivitas antar wilayah, dan jumlah fasilitas pelayanan. Ketersediaan aspek-aspek tersebut mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan dan kemajuan suatu wilayah (Maryati *et al.*, 2022)

Pemerataan alokasi wilayah pembangunan secara spesifik, pembangunan daerah merupakan kebijakan penting yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi kepentingan masyarakat. Tercapainya kemandirian dan kemajuan yang merata merupakan tujuan lain dari perkembangan wilayah. Peran masyarakat dan pemerintah daerah yang lebih tinggi dalam pembangunan ditunjukkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi, yang menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis pembangunan daerah dibandingkan pendekatan sektoral (Siska, 2019). Di era otonomi daerah, interaksi antara pemerintah

daerah (kota/kabupaten) dan pemerintah pusat lebih bergantung pada mekanisme hubungan horizontal untuk menuntaskan perkembangan suatu wilayah dibandingkan kerangka hubungan vertikal yang bersifat hierarkis.

Tujuan perkembangan wilayah adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup di suatu daerah, mendorong pembangunan sosial ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Karena setiap daerah mempunyai ciri-ciri sosio-ekonomi, budaya, dan fisik yang berbeda, maka perkembangan suatu wilayah/daerah berupaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pusat perkembangan suatu wilayah yang umumnya juga berfungsi sebagai pusat pelayanan biasanya mempunyai fasilitas sarana yang lebih besar secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan fungsi dan peranannya yang harus mampu memberikan pelayanan bagi wilayah sekitarnya.

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan kepadatan penduduk makin tinggi yang mempengaruhi perkembangan wilayah. Kondisi kependudukan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah karena faktor demografi ikut mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan. Penduduk tidak saja berperan sebagai sasaran pembangunan tetapi juga menjadi pelaksana pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peran yang penting. Makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia makin mudah dan

tepat rencana pembangunan itu dibuat. Sebagai contoh, dalam perencanaan pendidikan, diperlukan data mengenai jumlah penduduk dalam usia sekolah, dan para pekerja dalam bidang Kesehatan masyarakat memerlukan informasi tentang tinggi rendahnya angka kematian dan angka morbiditas penduduk. Banyak lagi contoh-contoh lain di mana data kependudukan sangat diperlukan dalam perkembangan suatu wilayah. Hal lain yang berperan penting dalam perkembangan wilayah adalah fasilitas pelayanan.

Fasilitas pelayanan ini merupakan tempat penunjang dan kebutuhan primer diperlukan untuk kelangsungan hidup sehari-hari di suatu daerah tertentu. Pembangunan fasilitas pelayanan seperti sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, serta perdagangan dan jasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi, sosial, budaya serta persatuan dan kesatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memperlancar interaksi dan komunikasi antar kelompok dan masyarakat serta mengikat dan mengoptimalkan perkembangan suatu wilayah yang sering tidak seimbang. Selain fasilitas pelayanan ada beberapa indikator lain yang menjadikan suatu wilayah menjadi berkembang yaitu banyaknya penduduk dalam suatu wilayah, jarak antar wilayah ke kota/kecamatan, dan interaksi dua wilayah atau lebih. Hal tersebut yang menjadi patokan untuk menentukan suatu pusat ataupun tingkatan perkembangan suatu wilayah.

Pada kenyataannya fasilitas-fasilitas pelayanan justru terfokus pada

pusat kota yang menjadikan daerah pusat ini semakin berkembang baik dalam sektor kependuduk, aksesibilitas yg memadai dan jumlah fasilitas pelayanan yang bisa dibidang melampaui kebutuhan. Kebutuhan penduduk wilayah yang jauh dari pusat kota yang tentunya belum terpenuhi mendorong arus penduduk menuju ke pusat-pusat fasilitas pelayanan, yaitu di pusat kegiatan atau sering disebut Hirarki. Dalam hal ini permasalahan utama yang sering dihadapi dalam perkembangan antar wilayah selalu berkaitan dengan adanya ketidak seimbangan/kesenjangan wilayah. Salah satu ketidak seimbangan/kesenjangan tersebut dilihat dari tidak meratanya hasil perkembangan suatu wilayah baik dalam fasilitas, saran dan prasarana ataupun dari aksesibilitas yang kurang baik.

Penyediaan fasilitas pelayanan umum mendukung pertumbuhan dan perkembangan di suatu wilayah, kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Penting untuk menilai kebutuhan dan ketersediaan fasilitas pelayanan umum untuk mendorong perkembangan suatu daerah ataupun wilayah. Perkembangan wilayah biasanya didukung baik dalam sektor pertumbuhan maupun pemerataan, dengan mendorong pembangunan daerah yang optimal dapat menciptakan keseimbangan yang nyata antar daerah (Muliana, 2018).

Pusat pelayanan, juga disebut sebagai tempat kegiatan pusat, dimana wilayah yang menawarkan berbagai manfaat dan kapasitas yang menjamin masyarakat di mana mereka berada. Pusat pelayanan umum yang diperlukan oleh masyarakat di suatu wilayah meliputi fasilitas

yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pelayanan pemerintahan dan umum, tempat ibadah, serta prasarana pendukung. Kriteria yang diperlukan untuk fasilitas umum di suatu wilayah perlu diubah untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat, termasuk ketersediaan fasilitas pelayanan umum

Banyaknya permintaan terhadap jumlah fasilitas pelayanan dari tahun- ketahun sering tidak seimbang dengan kemampuan wilayahnya. Wilayah yang kemampuannya sangat rendah justru membutuhkan tambahan fasilitas pelayanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang sudah maju, selain fasilitas pelayanan yang dapat membangun suatu wilayah terdapat pula aksesibilitas yang baik dan jumlah penduduk yang seimbang. Mengoptimalkan pusat pelayanan adalah salah satu cara untuk mengatasi ketidakseimbangan perkembangan suatu wilayah. Pusat pelayanan merupakan kota-kota yang menyajikan barang dan jasa bagi masyarakat di wilayah sekelilingnya dengan membentuk suatu hirarki berdasarkan jarak dan ambang batas penduduk (Siska, 2019).

Struktur penentuan tingkat perkembangan suatu wilayah atau disebut juga suatu hierarki ditentukan oleh populasi dan wilayah yang dicakup. Hal ini dimaksud dengan menciptakan hierarki yang dikenal sebagai pusat pelayanan yang didasarkan pada ambang batas populasi dan jarak (Gulo, 2015). Dalam tigtakan hierarki pusat layanan ini dilihat dari tingkatan orde yang didapat berdasarkan indeks sentralitas. Perhitungan indeks sentralitas merupakan lanjutan metode gravitasi yaitu

mengklasifikasikan jenis fasilitas dan jumlah banyaknya penduduk dalam kurun waktu tertentu serta meninjau hasil data perhitungan yang menetapkan suatu wilayah menjadi pusat (*central*) karena tingkat kestrategisan wilayah yang menentukan wilayah tersebut adalah pusat pelayanan/kegiatan dapat ditinjau dari nilai sentralitas yang dilihat dari nilai indeks sentralitas wilayah tersebut.

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan daerah otonom yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu (induk) yang berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (BPS Labuhanbatu Utara, 2024). Kabupaten Labuhanbatu Utara lahir dan tumbuh dari tuntutan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sebagai daerah otonom baru yang saat ini memasuki usia yang ke-6 (enam) tahun. Lokasi yang terkonsentrasi pada satu kegiatan dimungkinkan bagi persentase penduduk tertentu yang mempunyai akses terhadap infrastruktur yang lengkap melalui pengelolaan tata ruang yang terencana dan disiplin. Perubahan dari tahun ke tahun suatu wilayah menjadi pusat kegiatan dengan tujuan membangun sarana atau prasarana yang dapat mendukung tumbuhnya kegiatan di wilayah tersebut terutama dalam pembangunan fasilitas pelayanan umum. Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh

Pohan (2015) tentang dampak pembangunan di kabupaten Labuhanbatu Utara pasca pemekaran tahun 2008 menyatakan bahwa perekonomian kabupaten Labuhanbatu Utara lebih baik daripada sebelumnya. Karena dengan adanya pemekaran tersebut, masyarakat relatif lebih responsif terhadap kebijakan pemerintahan kabupaten, namun pertumbuhannya masih pluktuatif dan relatif moderat. Hal ini dikarenakan umur pemerintahan yang masih sangat belia sehingga kinerjanya juga belum begitu efektif dan perlu banyak penyesuaian dan perbaikan. Dikarenakan belum efektifnya sistem otonomi daerah, kesenjangan antar daerah yang masih tinggi, dan lemahnya kemandirian daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga lemah juga dalam melakukan pembangunan, maka perlu bagi para pemangku kepentingan di setiap daerah untuk mengetahui secara detail tentang daerahnya, terkhusus dibidang ekonomi. Mulai dari struktur perekonomian, sektor unggulan, daerah-daerah potensial, populasi dan sebagainya. Sehingga pemerintah daerah sebagai pemegang regulasi dan seluruh stakeholder-nya dapat membuat kebijakan yang tepat, guna memaksimalkan pengembangan daerah serta sektor-sektor potensial sampai menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya

Tujuan dari penyediaan fasilitas pelayanan umum masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat

perkembangan masing-masing kecamatan diantara sembilan kecamatan yang membentuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara karena wilayah ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Labuhanbatu induk sehingga peneliti ingin melihat perkembangan wilayah tersebut, maka Kabupaten Labuhanbatu Utara dipilih sebagai daerah penelitian. Hal ini ditentukan dengan melihat pusat pelayanan dan melihat perbandingan perkembangan wilayah yang mengalami pemekaran serta mengkaji variasi potensi yang menyebabkan perkembangan yang berbeda di tiap kecamatan yang ada. Daftar lengkap pusat pelayanan umum di wilayah ini ditinjau dari 5 tahun terakhir. Pada penelitian ini selain bertumpu pada fasilitas pelayanan juga didukung oleh beberapa indikator lainnya yaitu jumlah penduduk dan konektivitas wilayah. Permasalahan mengenai kesenjangan dan ketidakseimbangan antar wilayah yang mengalami pemekaran inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang tingkat perkembangan wilayah di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan dengan ketersediaan fasilitas pelayanan dengan judul penelitian **“Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Berdasarkan Jumlah Fasilitas Pelayanan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa di Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami ketimpangan dalam sektor perkembangan wilayah yang signifikan. Perbedaan tingkat

perkembangan wilayah tersebut dilihat dari perbedaan banyaknya jumlah penduduk, fasilitas pelayanan dan konektivitas antar kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kecamatan yang memenuhi kualifikasi tersebut yang dimana jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan seimbang dan dekat dengan pusat kota maka wilayah tersebut mengalami tingkat perkembangan yang lebih tinggi dibanding kecamatan yang lainnya.

Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai saat ini belum diidentifikasi mengenai kecamatan-kecamatan mana yang menjadi pusat pelayanan dan mana yang mengalami perkembangan wilayah. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat merumuskan kebijakan perkembangan wilayah yang lebih merata dan seimbang.

C. Pembatasan Masalah

Berikut pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikaji yaitu pada penentuan pusat pelayanan di tiap kecamatan yang ada di Labuhanbatu Utara setelah mengalami pemekaran dengan melihat jumlah penduduk, banyaknya fasilitas pelayanan dan konektivitas antar wilayah di tiap kecamatan. Serta mengetahui tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Labuhanbatu utara dengan menjumlahkan hasil skoring dari semua variabel yang sudah diperoleh, yaitu variabel kependudukan, fasilitas pelayanan, dan konektivitas antar wilayah.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut, dengan memperhatikan keterbatasan masalah di atas:

1. Bagaimana klasifikasi pusat pelayanan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam penentuan pusat pelayanan.
2. Bagaimana tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2018-2023 berdasarkan dari semua variabel yang sudah diperoleh

E. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pusat pelayanan di Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Menganalisis tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2018-2023 berdasarkan semua variabel yang sudah diperoleh

F. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pusat pelayanan dan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- b. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan bahan atau literatur ilmiah untuk penulisan ilmiah mengenai permasalahan yang sama, serta keahlian dan wawasan mengenai penelitian

ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dosen

Temuan penelitian ini dapat dikonsultasikan kepada dosen atau tenaga pengajar lainnya untuk menyempurnakan proses pendidikan.

b. Untuk Mahasiswa

Secara khusus, penelitian ini dapat membantu mahasiswa menjadi lebih mahir dalam mengidentifikasi orde wilayah dalam penentuan pusat pelayanan serta menganalisis materi yang berkaitan dengan perkembangan wilayah dalam mata kuliah metodologi analisis keruangan.

c. Bagi Peneliti

Penulis hendaknya mengembangkan ilmu, pemahaman, dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh studi di Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan.

THE
Character Building
UNIVERSITY